

## SKRIPSI

### KONTRAK PENGADAAN BARANG YANG TIDAK MENCANTUMKAN BATAS WAKTU MENURUT KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 dan UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

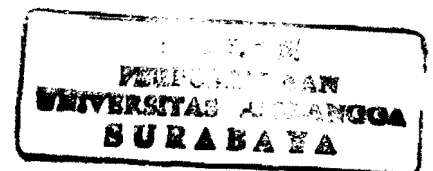
Per 108/05  
Giu  
k



**AGUS SALMAN GIUSTI**

**NIM. 030111001 U**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



**KONTRAK PENGADAAN BARANG YANG TIDAK MENCANTUMKAN  
BATAS WAKTU MENURUT KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80  
TAHUN 2003 dan UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



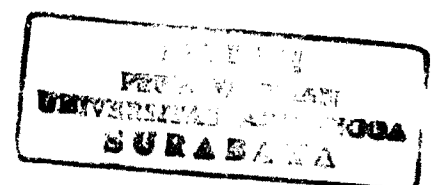
**Dosen Pembimbing,**

**L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.**  
**NIP. 131.878.385**

**Penyusun,**

**Agus Salman Giusti**  
**NIM. 030111001 U**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Terhadap Kontrak Pengadaan Barang yang tidak mencantumkan batas waktu merupakan pelanggaran Keppres 80/2003 sehingga sifat hukum kontrak dimaksud menjadi batal demi hukum.
- b. Terhadap Kontrak Pengadaan Barang yang tidak mencantumkan batas waktu merupakan kegiatan usaha yang mengarah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena dengan tidak dicantumkannya batas waktu kontrak secara definitif menimbulkan *barrier to entry* bagi pelaku usaha yang lain. Sedangkan Kontrak Pengadaan Barang yang tidak mencantumkan batas waktu bukan merupakan bentuk persekongkolan tender.

#### **2. Saran**

- a. Untuk lebih menjamin efisien dan transparansi pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang yang dilakukan oleh pelaku usaha, diperlukan suatu pengawasan yang ketat dari KPPU. Untuk memudahkan pengawasan tersebut, KPPU ini melakukan penilaian dan pembuktian terhadap kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 (b) UU Persaingan jo. Pasal 35 (7) Keppres 80/2003.

- b. Hendaknya pelaku usaha lebih menaati peraturan perundang-undangan tentang larangan persekongkolan tender yang mengarah pada praktik monopoli, yaitu UU Persaingan dan Keppres 80/2003. Hendaknya pula Pemerintah khususnya KPPU lebih mensosialisasikan peraturan tersebut agar pelaku usaha dapat melaksanakan usahanya dengan baik sehingga meminimalisasi kasus persaingan usaha tidak sehat dan praktik monopoli.

